

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Etika sangat dekat dengan kehidupan manusia, dari dahulu hingga sekarang. Etika sangat erat kaitannya dengan moralitas, yang mana setiap individu dalam perjalanan kehidupannya pasti bersinggungan dengan etika dan juga moral. Justru di zaman sekarang isu tentang etika semakin marak, manusia semakin tertarik untuk mempelajari etika. Hal itu karena manusia sekarang menghadapi masalah moral yang baru dan bisa jadi lebih berat. Masalah-masalah itu disebabkan karena perkembangan pesat di bidang ilmu dan teknologi, tetapi juga karena perubahan sosio-budaya yang mendalam yang pada waktu bersamaan berlangsung di berbagai tempat pada masyarakat modern.¹

Semua lapisan masyarakat seharusnya dapat menjunjung tinggi etika di mana pun berada dan dengan siapa pun melangsungkan hubungan sosial. Tak ada manusia yang luput dari nilai etika dalam hidupnya. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai manusia yang berada di tengah-tengah masyarakat juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai

¹ K. Bertens, *ETIKA* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. ix

etika, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun lingkungan kerja di mana mengabdikan. Sebagai salah satu contoh sikap etika yang baik adalah tidak mengambil hak orang lain, apalagi dengan cara-cara licik. Sebagai seorang punggawa pemerintah sudah sepatutnya memberikan tauladan kepada masyarakat tentang sikap-sikap beretika.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, pada pasal 9 yang menyatakan bahwa etika dalam berorganisasi, diantaranya adalah melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku serta patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja. Namun pada realitanya masih ditemukan pegawai yang tidak menaati peraturan tersebut, mereka dengan sengaja melanggar ketentuan yang terkandung dalam Undang-undang.

Dari hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkot Bekasi di sejumlah pusat perbelanjaan di kota Bekasi pada saat jam kerja kantor, ditemukan sejumlah pegawai yang masih mengenakan seragam dinas berkeluyuran di luar kantor bukan untuk kepentingan instansi. Dari hasil sidak, terjaring setidaknya 53 pegawai, 28 orang di antaranya

berkantor di Dinas Pendidikan Kota Bekasi.² Sungguh sangat disayangkan yang mana seharusnya aparatur negara bertugas melayani masyarakat malah seenaknya sendiri memuaskan hasrat pribadi dengan berbelanja dan berwisata pada saat jam kerja.

Beberapa pegawai juga kedatangan tidak hadir ketika Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi mengadakan inspeksi mendadak di sejumlah SKPD di Bekasi. Pegawai-pegawai tersebut kemudian diberi arahan oleh wakil walikota Bekasi, Ahmad Syaikh, untuk dapat meningkatkan disiplin kerja dan tanggung jawab sebagai aparatur negara. Dari sebanyak 134 pegawai-pegawai ini beberapa di antaranya berasal dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi.³

Mental korupsi juga sering menjadi penyakit yang sering menjangkiti segelintir pegawai. Mental korupsi ini, salah satunya, adalah termasuk dalam penyimpangan etika. Bukti nyata lainnya bahwa telah terjadi penyimpangan etika di kehidupan bermasyarakat, khususnya di lingkungan pegawai negeri sipil, adalah fenomena yang terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Dua orang

² IM, "Pemkot Bekasi Berharap Ada Efek Jera Kepada Mereka Yang Membandel", 2013 <http://www.indonesiamedia.com/2013/08/29/keluyuran-jam-kerja-foto-dan-nama-pns-kota-bekasi-dipajang-di-web/> (diunduh tanggal 13 Februari 2015)

³ Leny, "134 Pegawai Pemkot Bekasi Mangkir", 2014 <http://www.bekasibusiness.com/2014/03/17/134-pegawai-pemkot-bekasi-mangkir/> (diunduh tanggal 13 Februari 2015)

pegawai Dinas Pendidikan Kota Bekasi ditahan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi terkait tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan peningkatan kesejahteraan guru non-PNS SD/ MI dan SMA/ SMK daerah terpencil dan perbatasan di kota Bekasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bersumber dari APBD 2011 dan 2012.⁴

Uang yang seharusnya sampai pada tangan penerima –guru non PNS SD/ MI dan SMA/ SMK daerah terpencil dan pelosok di Bekasi- malah bermuara di tangan oknum tidak bertanggung jawab. Oknum tersebut memanfaatkan kesempatan itu untuk memperkaya diri dan keluarganya saja. Para oknum tersebut telah mengambil hak orang lain tanpa izin, membiarkan hak kesejahteraan guru di daerah terpencil dan pelosok jatuh ke tangan yang bukan haknya. Sungguh perbuatan tidak beretika.

Sebenarnya para pelaku tahu bahwa, hal itu merupakan tindakan melanggar hukum dan menentang nilai etika yang berlaku, namun dengan sengaja pelaku melakukan itu dengan sadar dan kemudian menikmati hasil tangan jahatnya tersebut. Guna nilai etika dianut oleh setiap orang adalah supaya manusia dapat membedakan antara hal yang baik dan yang buruk, serta dapat menganalisis apakah

⁴ MKL/ AF, “2 Staff Dinas Pendidikan Kota Bekasi Ditahan Kejari”, 2014 <http://www.beritasatu.com/hukum-kriminalitas/171026-2-staf-dinas-pendidikan-kota-bekasi-ditahan-kejari.html> (diunduh tanggal 20 Januari 2015)

tindakan yang dilakukan berdampak baik atau buruk bagi diri maupun lingkungannya.

Selain perilaku mengambil hak orang lain, perilaku mengahambur-hamburkan uang juga terjadi di Dinas Pendidikan kota Bekasi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi menyoroti masih adanya pelanggaran terkait larangan menggelar rapat di hotel. Diketahui bahwa jajaran Dinas Pendidikan Kota Bekasi menggelar rapat di salah satu hotel di kawasan Lembang, Bandung.⁵

Kegiatan rapat yang sengaja dilakukan di hotel merupakan suatu tindakan yang tidak mendukung efisiensi anggaran dan merupakan pemborosan uang negara. Kegiatan rapat bisa saja dilangsungkan di gedung kantor, sehingga uang yang ada dapat dialokasikan ke hal-hal yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Fenomena-fenomena buruk yang terjadi di atas merupakan beberapa peristiwa yang menggambarkan adanya degradasi etika dalam diri manusia yang penyebabnya adalah tidak dianutnya nilai etika moral oleh para pelaku. Pelaku dapat dikatakan melakukan perbuatan immoral, tidak sesuai dengan kaidah perilaku yang beretika,

⁵ Suprpto, "Menpan Tegur SKPD Bekasi Rapat di Hotel", 2014 <http://www.tabloidharapanindahnews.com/read/2014/11/21/19/787/menpan-tegur-skpd-bekasi-rapat-di-hotel#.VN4YYq5z3IU> (diunduh tanggal 13 Februari 2015)

atau dalam istilah lain para pelaku tindak pelanggaran hukum dan sekaligus melanggar etika tersebut berpegang pada nilai dan norma yang tidak baik.

Munculnya perilaku-perilaku immoral yang merugikan orang lain, mendorong perlunya penggalian tentang jati diri. Tentang bagaimana nilai-nilai etika tertanam dalam diri manusia. Dirasa perlu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pengamalan nilai-nilai etika pada diri manusia, khususnya pegawai.

Seperti yang diungkapkan E-Pynes, bahwa untuk dapat menumbuhkan standar etika yang tinggi, maka perlu integritas yang tinggi pula.⁶ Integritas dirasa penting untuk dimiliki oleh semua manusia, termasuk pegawai, agar manusia senantiasa menjunjung nilai-nilai etika.

Sayangnya pada zaman sekarang banyak pegawai yang minim akan integritas. Padahal sesungguhnya integritas banyak diminati oleh khalayak ramai. Dunia ini lapar akan integritas. Namun, integritas itu hanya diminati dalam sebatas keilmuan saja, tidak pada implementasinya.

Manusia paham akan apa itu makna integritas, namun pada kenyataannya manusia miskin akan penerapan integritas. Hal itu

⁶ Joan E-Pynes, *Human Resources Management For Public And NonProfit Organizations-A Strategic Approach* (San Fransisco: Jossey Bass, 2009), h. 331

terjadi karena integritas itu seperti cuaca: orang berbicara mengenainya tetapi tak ada seorang pun yang tahu apa yang harus dikerjakan dengan itu. Integritas merupakan istilah yang sering dikatakan, dan lebih banyak diinginkan.⁷ Namun integritas minim akan pelaksanaan, hanya segelintir orang yang ajeg menjalankan integritas.

Andaikata integritas memiliki sebuah lawan kata, maka menurut Stephen, kata yang tepat adalah korupsi – lolosnya segala sesuatu yang diketahui salah.⁸ Banyak orang berkata bahwa bangsa ini adalah bangsa yang menuntut integritas, namun sepertinya itu tidaklah sebuah kesungguhan. Terbukti dari maraknya kasus korupsi yang terjadi, *Mindset* menghambur-hamburkan uang dan memperkaya diri sendiri yang masih diidap oleh banyak kalangan masyarakat bangsa ini.

Integritas penting untuk tidak hanya sekedar dimiliki dan diketahui definisinya oleh setiap orang, tetapi juga diamalkan. Pengamalan integritas dalam diri seseorang, terutama pegawai akan menghindarkannya dari perbuatan-perbuatan immoral. Pegawai yang paham benar akan makna integritas dan tahu bagaimana cara mengamalkan integritas dalam kehidupannya, akan senantiasa sadar akan apa yang akan, sedang, dan telah dilakukannya. Sehingga

⁷ Stephen L. Carter, *Integritas*, penerjemah Th. Hermaya (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), h. 8

⁸ *Ibid.*,

pegawai tersebut akan selalu berada dalam koridor perilaku beretika dan bermoral.

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini, karena penulis merasa penting untuk mengetahui, apakah terdapat hubungan antara integritas dan etika dalam diri pegawai. Penulis melakukan penelitian yang mengangkat tema: Hubungan Antara Integritas Dengan Etika Pegawai Di Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka dapat dirumuskan masalah-masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Apakah status tanggung jawab kerja berpengaruh terhadap etika?
2. Apakah standar operasional kerja berpengaruh terhadap etika?
3. Apakah kondisi ekonomi berpengaruh terhadap etika?
4. Apakah posisi jabatan di kantor berpengaruh terhadap etika?
5. Bagaimana upaya agar pegawai memiliki etika dalam kehidupan kerjanya?
6. Apakah terdapat hubungan antara integritas dengan etika pegawai di Dinas Pendidikan Kota Bekasi?

C. Pembatasan Masalah

Integritas pada penelitian ini dibatasi pada apakah pegawai menggunakan integritasnya dalam kehidupan kerja.

Etika pada penelitian ini dibatasi pada penerapan etika oleh pegawai, sesuai dengan norma-norma dan nilai moral yang disepakati bersama.

Subjek pada penelitian ini adalah para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan dinas pendidikan. Lokasi penelitian dibatasi pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

D. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka masalah yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

Apakah terdapat hubungan antara integritas dengan etika pegawai di Dinas Pendidikan Kota Bekasi?

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Berikut diuraikan manfaat-manfaat yang diharapkan, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu pendidikan secara umum, dan ilmu manajemen pendidikan secara khusus. Hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi pada penelitian-penelitian berikutnya, serta sebagai bahan rujukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara integritas dan etika pada pegawai, sehingga manfaatnya kelak dapat diimplementasikan dalam dunia pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi pihak-pihak terkait, diantaranya:

a. Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk dapat mengusahakan upaya-upaya yang dapat menumbuhkan integritas pegawai sehingga akan terbentuk perilaku beretika yang akhirnya menimbulkan suasana keharmonisan di lingkungan kerja.

b. Pegawai Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan pembaca

Diharapkan penelitian dapat bermanfaat bagi individu-individu yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi khususnya, serta pembaca pada umumnya. Diharapkan agar manusia-manusia di negeri ini memiliki integritas yang utuh dalam menjalankan kehidupannya sebagai manusia sehingga akan tercipta perilaku beretika pada sesama dan menimbulkan keharmonisan dalam berkehidupan.